



RENCANA KERJA (PERUBAHAN) TAHUN 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Samarinda

Jl. Sentosa Dalam No. 01 Kelurahan
Sungai Pinang Dalam Kecamatan
Sungai Pinang Kota Samarinda



  @BPBDSamarinda

magnificent
SAMARINDA

0811-5537-007





WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2024, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 7), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 19);
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja)

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah;
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 berpedoman pada Perubahan RKPD, dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
- c. BAB III Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. BAB IV Penutup.

Pasal 4

(1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 terdiri dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
- e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
- g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
- h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
- k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
- o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
- p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

(2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:

- a. Sistematika dan Substansi Penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2024.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Agustus 2024
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 501

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda merupakan tahun Pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2021 – 2026.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2024 nanti juga akan dilaksanakan sesuai rencana.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Samarinda, 31 Desember 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2024	
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA BPBD Tahun 2024 Triwulan IV dan Capaian RENSTRA BPBD Kota Samarinda.....	13
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	27
 BAB IV PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2024. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 Kota Samarinda.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024.

Renja BPBD mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Adapun visi BPBD Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah ***"Terwujudnya Lembaga dan Masyarakat Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana"***

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi BPBD Kota Samarinda tahun 2017-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana
3. Merumuskan regulasi yang mendukung upaya-upaya percepatan penanggulangan bencana
4. Mengurangi kerentanan, memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
5. Mencegah meluasnya kejadian bencana

Renja BPBD dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BPBD Kota Samarinda tahun 2024 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Samarinda khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja BPBD Kota Samarinda Tahun 2023 adalah :

- a. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587);
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana ;

- k. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana ;
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
- q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana ;
- r. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- s. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penggulangan Bencana ;
- t. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- u. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 309);
- å. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- ä. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- ö. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 tahun 2010, Nomor : 0199/M/PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK/07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- aa. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3887 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- bb. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- cc. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ee. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
- ff. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda ;
- gg. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025.
- hh. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
- ii. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
- jj. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021;
- kk. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021);
- ll. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
- mm. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
- nn. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
- oo. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2026;
- pp. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
- qq. Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 24 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- rr. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk menempatkan program Penganggulangan Bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda tahun 2021 - 2026, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap upaya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan.

Tujuan Internal:

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
2. Menyediakan dokumen acuan bagi BPBD Kota Samarinda dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kota, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda.

4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di BPBD Kota Samarinda dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di BPBD Kota Samarinda dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tujuan External:

1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kota Samarinda yang berorientasi untuk Pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap bencana.
2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan bencana, baik dalam kondisi pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa Pemerintah Daerah Kota Samarinda memiliki *concern* yang besar terhadap upaya Penanggulangan Bencana di Kota Samarinda.
4. Mensinergikan program-program dan kegiatan penanggulangan bencana dengan program-program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman resiko bencana, baik di SKPD lain, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran program penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja BPBD Kota Samarinda Tahun 2023, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen

RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Kota Samarinda Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPBD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada Bagian ini menjelaskan uraian rencana program, kegiatan, indikator kinerja beserta target capaian kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 beserta pagu indikatif anggaran nya di tahun 2024 yang akan datang mengenai program dan kegiatan nya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2024

Rencana Kerja BPBD Kota Samarinda adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kota Samarinda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pada tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda berupaya memenuhi beberapa sasaran kinerja yang sudah direncanakan di dalam Renstra Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bencana
2. Meningkatnya pelayanan dalam penanggulangan bencana
3. Meningkatnya pelayanan pasca bencana

Terkait dengan hal tersebut rencana kerja (RENJA) BPBD Kota Samarinda ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kota Samarinda selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

Tabel TC-29

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Triwulan 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Realisasi		Target Kinerja		Triwulan			Triwulan			Triwulan			Triwulan			Realisasi		Realisasi		Tingkat																				
							Capaian		dan Anggaran		1			2			3			4			Capaian		Kinerja dan		Capaian																				
							Kinerja		RKPD Kota Tahun														Kinerja		Anggaran		Kinerja dan																				
							RPJMD Kota		berjalan yg														dan Anggaran		Kota s/d Tahun		Realisasi																				
							Sampai Dengan		dievaluasi (2024)														RKPD Kota yang		(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Anggaran																				
RKPD Kota Tahun Lalu -2023										Su mb er Dan a		K		Rp		Su mb er Dan a		K		Rp		Sumber Dana		K		Rp		Su mb er Dan a		K		Rp		K		Rp		K		Rp							
		K		Rp		K		Rp		-1		-1		-1		-2		-2		-2		-3		-3		-3		-4		-4		-4				K		Rp		K		Rp		K		Rp	
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda																																										
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			16,988,85 3,562		18,212,17 2,701			1,624,772 ,506			2,709,1 40,368			5,220,84 0,594			7,352,858 ,346			16,907,6 11,814		33,896,46 5,376	84.14	92.84																		
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		7,347,853 ,804		10,105,99 2,278			214,971,9 76			822,32 7,934			3,057,31 0,641			4,957,155 ,409			9,051,76 5,960		16,399,61 9,764	70.97	89.57																			
1	5	3				Persentase Masyarakat yang terlayani dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi			29.63 %					0					19			19						64.12																			
1	5	3				Persentase Jumlah korban terdampak bencana yang dapat dibantu, ditolong, dan dievakuasi dengan sarana prasarana kedaruratan			49.82 %					0					29			29						58.21																			
1	5	3				Persentase Masyarakat yang mendapat Sosialisasi, Edukasi, dan Informasi			47.96 %					0					27			27						56.3																			

1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			181,598,951		508,200,000				0			0		238,638,140			204,137,187		442,775,327		624,374,278	91.67	87.13
1	5	3	2.01			Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana			4 Jenis					1					3			4					100	
1	5	3	2.01	3	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			0		239,600,000			0	PAD			0		53938140			158970446		212,908,586		212,908,586	100	88.86
1	5	3	2.01	3		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi			1 Dokumen					1								1					100	
1	5	3	2.01	4	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			0		268,600,000			0	PAD			0		184700000	PAD		45166741		229,866,741		229,866,741	83.33	85.58
1	5	3	2.01	4		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			300 Orang					50						200		250					83.33	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									91.67	87.13		
Predikat Kinerja																									ST	T		
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			4,081,450,263		5,758,110,704			204,311,976			412,502,162			1,327,804,808			3,115,211,405		5,059,830,351		9,141,280,614	88.89	87.87
1	5	3	2.02			Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan			9 Jenis					1					6			7					77.78	
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		5	84,974,900		949,593,054			0	PAD			0		0	PAD		878921222		878,921,222		963,896,122	80	92.56
1	5	3	2.02	6		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			5 Kawasan					1					3			4					80	
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		6	21,032,750		250,000,000			0	PAD			13580500		65700000	PAD		139603495		218,883,995		239,916,745	81.82	87.55
1	5	3	2.02	8		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya			11 Orang					3						6		9					81.82	
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi		1	196,835,281		250,000,000			0	PAD			0		75268357	PAD		122562391		197,830,748		394,666,029	100	79.13

1	5	3	2.02	9		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi			2 Dokumen			0					2		2				100		
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		9 9	1,042,306 ,249		831,474,6 50		0	PAD		205300 00		4723024 5	PAD		46675729 8		534,517, 543	1,576,823 ,792	75	64.29
1	5	3	2.02	10		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan			500 Orang			125					250		375				75		
1	5	3	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		0	0		250,000,0 00		0	PAD		0		2267803 5	PAD		18956114 0		212,239, 175	212,239,1 75	100	84.9
1	5	3	2.02	11		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi			2 Dokumen			0					2		2				100		
1	5	3	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		2	47,782,40 0		230,000,0 00		0	PAD		364625 00		6430000 0	PAD		48501510		149,264, 010	197,046,4 10	61.02	64.9
1	5	3	2.02	12		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			59 Keluarga			12					24		36				61.02		
1	5	3	2.02	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			0		1,200,000 ,000		0	PAD		419477 59		6768976 30	PAD		46004044 7		1,178,88 5,836	1,178,885 ,836	100	98.24
1	5	3	2.02	13		Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana			12 Dokumen			3					9		12				100		
1	5	3	2.02	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			0		250,000,0 00		10216976	PAD		171629 55		1715912 0		19674092 1		241,279, 972	241,279,9 72	100	96.51	
1	5	3	2.02	14		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi			1 Dokumen			1							1				100		
1	5	3	2.02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			0		387,043,0 00		0	PAD		138659 124		1674100 00	PAD		70926928		376,996, 052	376,996,0 52	100	97.4
1	5	3	2.02	15		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas			10 Unit			5					5		10				100		
1	5	3	2.02	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			0		350,000,0 00		0	PAD		0		2212150 0	PAD		24504301 9		267,164, 519	267,164,5 19	80	76.33
1	5	3	2.02	16		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			100 Orang			25					55		80				80		

1	5	3	2.02	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		0	810,000,000		194095000	PAD	144159324		169039921		296553034	803,847,279	803,847,279	100	99.24	
1	5	3	2.02	17		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen				1						1			100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				88.89	87.87
Predikat Kinerja																				T	T
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1,952,938,556	2,297,484,733		7,125,000		125,136,600		935,331,108		1,122,049,593	2,189,642,301	4,142,580,857	56.11	95.31	
1	5	3	2.03			Jumlah Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Jenis				1				1		2			40	
1	5	3	2.03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		15,274,000	35,500,000		0	PAD	0		2750000	PAD	8678800	11,428,800	26,702,800	100	32.19	
1	5	3	2.03	1		Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan				0				1		1			100	
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		36,770,000	94,000,000		0	PAD	14860000		21726437		32300893	68,887,330	105,657,330	100	73.28	
1	5	3	2.03	2		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen				1						1			100	
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		190001,570,605,416	1,173,000,000		4375000	PAD	14960000		391000931		748959900	1,159,295,831	2,729,901,247	3.33	98.83	
1	5	3	2.03	3		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3000 Orang				100						100			3.33	
1	5	3	2.03	9	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		0	813,191,733		1750000	PAD	67566600		465786634		261756000	796,859,234	796,859,234	33.33	97.99	
1	5	3	2.03	9		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan	1500 Orang				500						500			33.33	

						Evakuasi Korban Bencana																							
1	5	3	2.03	10	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit			0	88,793,000			1000000	PAD		27750000			18267106		28062000		75,079,106		75,079,106		100	84.56		
1	5	3	2.03	10		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu			1 Dokumen				1								1					100			
1	5	3	2.03	11	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			0	93,000,000			0			0			35800000		42292000		78,092,000		78,092,000		0	83.97		
1	5	3	2.03	11		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			1 Laporan												0				0				
Rata-rata capaian kinerja (%)																												56.11	95.31
Predikat Kinerja																												R	ST
1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			1,131,866,034	1,542,196,841			3,535,000			284,689,172			555,536,585		515,757,224		1,359,517,981		2,491,384,015	47.22	88.15			
1	5	3	2.04			Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			5 Jenis				1						1		2				40				
1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		2	65,533,142	134,501,000			0	PAD		18627626			13725000		75157500		107,510,126		173,043,268	50	79.93			
1	5	3	2.04	1		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah			2 Dokumen					1							1				50				
1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		2	38,359,000	181,500,000			0	PAD		2785000			74170000	PAD		52489300		129,444,300		167,803,300	100	71.32		
1	5	3	2.04	2		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah			1 Dokumen					0						1		1			100				
1	5	3	2.04	3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		1	44,394,386	74,000,000			0	PAD		11522500			0		36685000		48,207,500		92,601,886	33.33	65.15			
1	5	3	2.04	3		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			3 Dokumen					1							1				33.33				
1	5	3	2.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		1	97,357,050	160,291,246			0	PAD		0			14296453		110451000		124,747,453		222,104,503	0	77.83			

1	5	3	2.04	4		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia			1 Dokumen				0						0				0					
1	5	3	2.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			0		37,600,000			0	PAD		0			24780000			945000		25,725,000	25,725,000	0	68.42	
1	5	3	2.04	5		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			1 Laporan				0									0				0		
1	5	3	2.04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			0		954,304,595			3535000	PAD		251754046			428565132	PAD		240029424		923,883,602	923,883,602	100	96.81	
1	5	3	2.04	10		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan			2 Kegiatan				1								1		2			100		
Rata-rata capaian kinerja (%)																								47.22	88.15			
Predikat Kinerja																								SR	T			
																								70.97	89.57			
																								S	T			
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9,640,999,758		8,106,180,423			1,409,800,530			1,886,812,434			2,163,529,953			2,395,702,937		7,855,845,854		17,496,845,612	97.31	96.91
1	5	1				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			75 NILAI			0			0			0			87.98		87.98				117.31	
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			81,715,970		200,000,000			0			3,773,500			45,151,600			100,525,846		149,450,946		231,166,916	100	74.73
1	5	1	2.01			Nilai AKIP			65 Nilai			1			10						54		65				100	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	44,406,470		100,000,000	PAD		0	PAD		3161500			28047550	PAD		49489416		80,698,466		125,104,936	100	80.7
1	5	1	2.01	1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen			1			1						3		5				100	
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	25,704,200		50,000,000	PAD		0	PAD		612000			6571000	PAD		31557194		38,740,194		64,444,394	100	77.48

1	5	1	2.01	6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan		0		1					1		2				100		
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	11,605,300		50,000,000	PAD		0	PAD		0		10533050	PAD		19479236		30,012,286	41,617,586	100	60.02
1	5	1	2.01	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan		0		0						4		4				100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100	74.73		
Predikat Kinerja																							ST	S		
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,535,496,020		6,235,740,425			1,375,467,836			1,605,264,956			1,616,816,640			1,621,378,636	6,218,928,068	11,754,424,088	100	99.73
1	5	1	2.02			Jumlah Bulan Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan			7 Laporan		3		3					1		7					100	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		36	4,877,596,790		5,435,272,428	PAD		1211667836	PAD		1352284956		1552243777	PAD		1320124898		5,436,321,467	10,313,918,257	100	100.02
1	5	1	2.02	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			36 Orang/bulan		9		9					36		36					100	
1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		18	614,415,508		750,467,997	PAD		163800000	PAD		234380000		54459363	PAD		283960787		736,600,150	1,351,015,658	100	98.15
1	5	1	2.02	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen		3		3					6		12					100	
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	43,483,722		50,000,000	PAD		0	PAD		18600000		10113500	PAD		17292951		46,006,451	89,490,173	100	92.01
1	5	1	2.02	5		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5 Laporan		1		1					3		5					100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100	99.73		
Predikat Kinerja																							ST	ST		
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,050,087,017		737,437,050			6,260,000			258,211,675			167,748,305			199,305,124	631,525,104	2,681,612,121	90.53	85.64
1	5	1	2.06			Jumlah Laporan Laporan Penyediaan Administrasi Umum			19 Laporan		0		1					18		19					100	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5	9,240,000		9,990,670	PAD		0	PAD		0		0	PAD		3497500		3,497,500	12,737,500	100	35.01

1	5	1	2.06	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket		0		2				3		5				100			
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5	1,697,282 ,400		375,225,4 10	PAD		0	PAD		229505 000		6982000 0	PAD		69959500		369,284, 500	2,066,566 ,900	100	98.42
1	5	1	2.06	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			16 Paket		0		12				4		16				100			
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 8	39,106,00 0		42,517,50 0	PAD		0	PAD		0		1243000 0	PAD		23550000		35,980,0 00	75,086,00 0	100	84.62
1	5	1	2.06	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			27 Paket		0		7				20		27				100			
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1	40,703,88 0		27,998,47 0	PAD		0	PAD		939345 0		4000000	PAD		14470200		27,863,6 50	68,567,53 0	100	99.52
1	5	1	2.06	5		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket		0		1				1		2				100			
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 8	11,724,25 0		12,000,00 0	PAD		0	PAD		0		0	PAD		5059000		5,059,00 0	16,783,25 0	68.18	42.16
1	5	1	2.06	8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			22 Laporan		0		5				10		15				68.18			
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 2	252,030,4 87		269,705,0 00	PAD		6260000	PAD		193132 25		8149830 5	PAD		82768924		189,840, 454	441,870,9 41	75	70.39
1	5	1	2.06	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan		1		2				6		9				75			
Rata-rata capaian kinerja (%)																							90.53	85.64		
Predikat Kinerja																							T	T		
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,292,475 ,828		265,650,0 00			0		0		181,155, 468			80,740,00 0		261,895, 468	1,554,371 ,296	100	98.59	
1	5	1	2.07			Laporan Rencana Kebutuhan Barang			4 Unit		0		1				3		4				100			
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1	931,475,8 28		243,350,0 00	PAD		0	PAD		0		1811554 68		59040000		240,195, 468	1,171,671 ,296	100	98.7	
1	5	1	2.07	2		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit		0		1						1				100			
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel			0		22,300,00 0	PAD		0	PAD		0		0	PAD		21700000		21,700,0 00	21,700,00 0	100	97.31
1	5	1	2.07	5		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			13 Unit		0		0				13		13				100			
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100	98.59		

Predikat Kinerja																									ST	ST		
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			117,642,363		107,908,948			28,072,694			19,562,303			17,589,994			38,756,381		103,981,372		221,623,735	100	96.36
1	5	1	2.08			Laporan Penyediaan Jasa			136 Laporan			3			34					99		136					100	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		36	97,642,363		79,508,948	PAD		28072694	PAD		16562303			15339994	PAD		16075381		76,050,372		173,692,735	100	95.65
1	5	1	2.08	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan			9			9					18		36					100	
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		89	20,000,000		28,400,000	PAD		0	PAD		3000000			2250000	PAD		22681000		27,931,000		47,931,000	100	98.35
1	5	1	2.08	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan			3			3					6		12					100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									100	96.36		
Predikat Kinerja																									ST	ST		
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			563,582,560		559,444,000			0			0			135,067,946			354,996,950		490,064,896		1,053,647,456	93.33	87.6
1	5	1	2.09			Laporan Pemeliharaan			16 Laporan			4			4					8		16					100	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0		222,855,000	PAD		0	PAD		0			41552750	PAD		119548154		161,100,904		161,100,904	80	72.29
1	5	1	2.09	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			30 Unit			7			7					10		24					80	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		7	528,648,560		316,589,000	PAD		0	PAD		0			89986196	PAD		223415796		313,401,992		842,050,552	100	98.99
1	5	1	2.09	2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit			2			2					6		10					100	
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	34,934,000		20,000,000	PAD		0	PAD		0			3529000			12033000		15,562,000		50,496,000	100	77.81

1	5	1	2.09	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit		0		1						1				100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							93.33	87.6
Predikat Kinerja																							ST	T
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)																							97.31	96.91
Predikat Kinerja																							ST	ST
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											0	1,624,772,506		0	2,709,140,368		0	5,220,840,594		0	7,352,858,346		16,907,611,814	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																							84.14	92.84
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																							T	ST

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokas i	Sumber Dana		Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda			19.597.274.901,00	19.189.905.588,00	18.307.575.621,00				18.814.337.668,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			19.597.274.901,00	19.189.905.588,00	18.307.575.621,00				18.814.337.668,00			
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			19.597.274.901,00	19.189.905.588,00	18.307.575.621,00				18.814.337.668,00			
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75 NILAI	8.508.150.311,00	8.160.780.998,00	8.160.780.998,00				8.534.337.668,00		
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	-	65 Nilai	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			5. Program Smart City Plus	106.090.000,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semu a Kcamatan, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semu a Kcamatan, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	36.090.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semu a Kcamatan, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhi nya Keuangan Perangkat DaerahJumlah Laporan	-	7 Laporan	6.663.689.261,00	6.290.341.000,00	6.290.341.000,00			5. Program Smart City Plus	6.219.169.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA

	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	5.833.559.761,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	780.129.500,00	595.042.000,00	595.042.000,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	756.281.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											

	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Laporan Penyediaan Administrasi Umum	-	19 Laporan	748.437.050,00	748.437.050,00	748.437.050,00			2. Program pengen dalian banjir dan pemban gunan sistem drainase modern	574.078.668,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	9.990.670,00	0,00	0,00	Kota Sama rinda, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Program pengen dalian banjir dan pemban gunan sistem drainase modern	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	375.225.410,00	375.225.410,00	375.225.410,00	Kota Sama rinda, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	140.000.000,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	27 Paket	42.517.500,00	0,00	0,00	Kota Sama rinda, Semu a Keca mata n, Semu	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA

													a Kel/D esa				
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	38.998.470,00	0,00	0,00	Kota Sama rinda, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	22 Laporan	22 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	Kota Sama rinda, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Program pengen dalian banjir dan pemban gunan sistem drainase modern	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	269.705.000,00	0,00	0,00	Kota Sama rinda, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Program pengen dalian banjir dan pemban gunan sistem drainase modern	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	

	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	-	4 Unit	205.650.000,00	265.650.000,00	265.650.000,00			2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	375.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	183.350.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	-	136 Laporan	170.500.000,00	136.478.948,00	136.478.948,00			5. Program Smart City Plus	240.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	150.500.000,00	0,00	0,00	Kota Sama rinda, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Sama rinda, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	-	16 Laporan	519.874.000,00	519.874.000,00	519.874.000,00			5. Program Smart City Plus	1.020.000.000,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	168.285.000,00	0,00	0,00	Kota Sama rinda, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	316.589.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA

28	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Masyarakat yang terlayani dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Persentase Masyarakat yang mendapat Sosialisasi, Edukasi, dan Informasi Persentase Jumlah korban terdampak bencana yang dapat dibantu, ditolong, dan dievakuasi dengan sarana prasarana kedaruratan	-	29,6347,9649,82 Persen Persen Persen	11.089.124.590,00	11.029.124.590,00	10.146.794.623,00				10.280.000.000,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	3 Jenis	4 Jenis	610.000.000,00	570.000.000,00	570.000.000,00			5. Program Smart City Plus	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	310.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)											

							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	300 Orang	300 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	9 Jenis	5.858.124.650,00	5.838.124.650,00	5.838.124.650,00			5. Program Smart City Plus	4.810.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan											
							Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	5 Kawasan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota											

						Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	11 Orang	11 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi										
						Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
						Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 Orang	500 Orang	831.474.650,00	831.474.650,00	831.474.650,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	1.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.02	0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana										

							Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.02	0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam											
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	59 Keluarga	59 Keluarga	250.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota											

							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota											
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 Unit	10 Unit	416.650.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang	100 Orang	350.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota											

						Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Dokumen	1 Dokumen	810.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	5 Jenis	2.645.000.000,00	2.645.000.000,00	2.645.000.000,00		5. Program Smart City Plus	3.120.000.000,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas										
						Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota										

							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Kecamatan, Semu Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3000 Orang	3000 Orang	1.200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Kecamatan, Semu Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1500 Orang	1500 Orang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Kecamatan, Semu Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit											

							Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	95.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	5 Jenis	1.975.999.940,00	1.975.999.940,00	1.975.999.940,00			2. Program pengendalian banjir dan pemban gunan sistem drainase modern	2.050.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota											

							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan											
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Program Smart City Plus	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda ini merupakan tindak lanjut dari Dokumen Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 yang memuat tentang rencana pelaksanaan dan aktualisasi kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda dalam pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 merupakan rencana kinerja dari semua program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda selama satu tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada dasar pelaksanaannya mengacu pada visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ***"Terwujudnya Lembaga dan Masyarakat Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana"***.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2024 ini adalah dengan memberikan prioritas kegiatan dalam upaya penanggulangan bencana. Prioritas program dan kegiatan Tahun 2024 yang tercakup dalam prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah :

- 1) Penanganan Pra Bencana (Pencegahan dan Kesiapsiagaan)
- 2) Penanganan Tanggap Darurat (Kedaruratan dan Logistik)
- 3) Penanganan Pasca Bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 ini disusun, semoga dapat menjadi acuan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024.

Samarinda, 31 Desember 2024
Kepala Pelaksana,

SUWARSO, A.Ks., M.Si
NIP. 196909201991121001

